

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENDUKUNG E-GOVERNMENT DI DESA TONGKE- TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI

*Amiruddin, Marsuki Ali*

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai

E-mail : al.amir.islam@gmail.com

### ABSTRAK

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dunia, tidak hanya untuk masyarakat perkotaan tetapi telah memasuki masyarakat desa, baik sektor pemerintah maupun swasta olehnya itu dibutuhkan perubahan dari pelayanan manual ke elektronik, dimana sebelumnya instansi pemerintah masih menggunakan basis kertas telah beralih menjadi pelayanan berbasis elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan TIK dalam mendukung e-government serta respon masyarakat terhadap pemanfaatan TIK dalam mendukung *e-government* di Desa Tongke-Tongke. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendalamannya mengambil lokus Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan TIK dalam mendukung e-government di Desa Tongke-Tongke masih kurang, ini terlihat dengan masih mengandalkan informasi berupa print out yang ditempel pada papan pengumuman desa karena belum memiliki website desa sementara respon masyarakat masih rendah disebabkan pelayanan yang diberikan masih lambat serta membutuhkan waktu yang lama seperti dalam pengurusan administrasi.

**Kata Kunci:** TIK, *e-Government*, manfaat TIK, respon masyarakat

### PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi di saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dunia, kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang cepat telah menjalar tidak lagi hanya untuk masyarakat perkotaan tetapi telah memasuki masyarakat desa, baik sektor pemerintah maupun swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun perkembangan tersebut akan menguasai pola kehidupan masyarakat, sehingga sistem *e-government* perlu dipersiapkan dengan baik. Akibat dari perkembangan tersebut membawa perubahan dari pelayanan manual ke elektronik, dimana sebelumnya instansi pemerintah masih menggunakan basis kertas telah beralih menjadi pelayanan berbasis elektronik. Hal ini yang menjadi cikal

---

bakal lahirnya layanan informasi yang berbasis elektronik yang berubah menjadi *e-government*. Alfiah, Nur Inna (2019)

Upaya mendukung pengembangan *e-government*, telah jelas dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk menghasilkan layanan yang mudah dan cepat.

Menurut Angraini (2015) Dalam penerapan aplikasi *e-goverment* juga membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga memerlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintahan dan masyarakat. Implementasi *e-government* di Indonesia saat ini dilihat dari sisi aplikasi layanan baik itu G2C, G2B, maupun G2G masih tertinggal jauh. Layanan back office (G2B) masih belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap layanan front office (G2C dan G2B). Hal ini disebabkan masih kurangnya komitmen dari para stakeholder. Penerapan ICT yang belum merata, tingkat kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang handal juga tercermin pada budaya kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tentang tujuan penerapan, manfaat maupun strategi pengembangan belum sepenuhnya terlaksana.

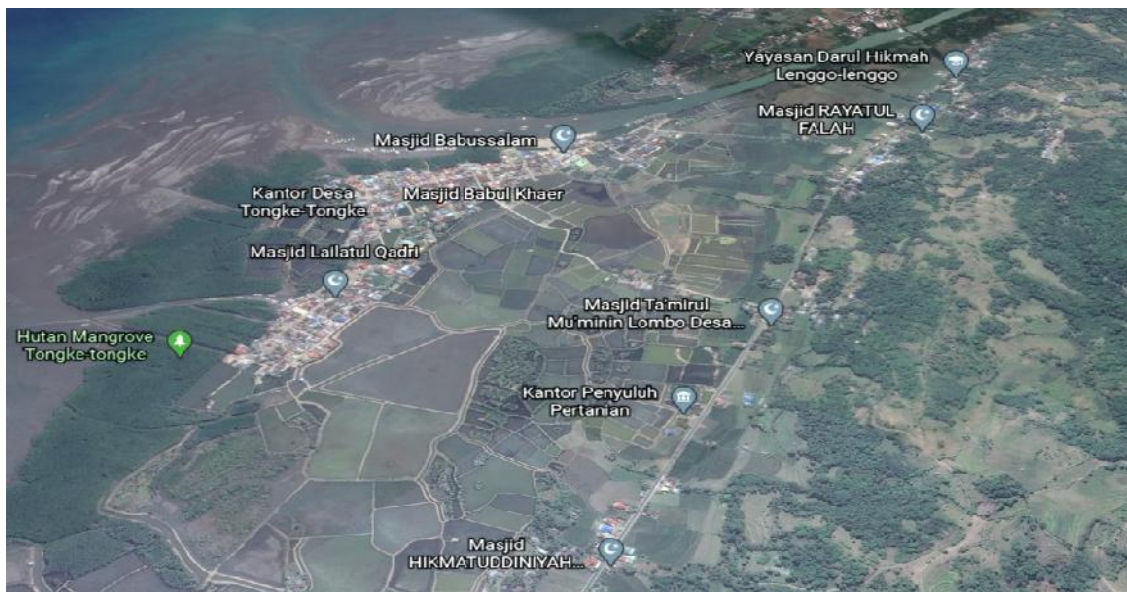
Kondisi yang terjadi di Desa Tongke-Tongke tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di mana kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan *e-government*. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut : pegawai yang ada di kantor desa Tongke-Tongke tidak ada yang berlatar pendidikan teknologi informasi dan komunikasi, kebanyakan mereka tamatan SMA sederajat dan ada yang sementara lanjut kuliah, begitupula dengan kepala desa, pengurusan surat-surat masih menggunakan model manual yang membutuhkan waktu yang lama untuk selesai, tidak tersedianya website desa, serta belum adanya regulasi dari pemerintah kabupaten Sinjai untuk mewajibkan semua desa berbasis *e-government*.

Apa yang terjadi di Desa Tongke-Tongke tersebut adalah kelemahan dalam proses pengaplikasian *e-government* yang perlu segera di atasi. Salah satu caranya

adalah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder di desa Tongke-Tongke bahwa untuk penerapan *e-government* tidak dapat dilaksanakan sekali dan secara menyeluruh, akan tetapi melalui tahapan-tahapan seperti persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan serta didukung oleh infrastruktur jaringan besar. Untuk itu artikel ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *e-government* di Desa Tongke-Tongke serta mengetahui respon masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *e-government* di Desa Tongke-Tongke.

## METODE PENELITIAN

Penguatan metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menginterpretasikan perspektif subjek dan penguatan observasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Tongke – Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabuptena Sinjai. Lokasi ini dipilih untuk memberikan gambaran dasar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Tongke-Tongke dan menjadi acuan pada penelitian selanjutnya serta program kerja desa.



Gambar 1. Peta Desa Tongke-Tongke

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. E-Government

e-Government hadir karena adanya tuntutan zaman dan dorongan dari masyarakat yang selalu menginginkan akan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta melahirkan rasa kepuasan kepada seluruh penerima layanan. Bank Dunia mendefinisikan E-Government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi di

---

bawah naungan pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, mobile computing, dengan dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya (Samudra Wibawa, 2009).

Definisi *e-Government* menurut bank dunia “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*”. Pada intinya electronic government adalah bagaimana meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to BusinessEnterprises*), dan G2G (*Government to Government*). (Supriyanto, 2016)

*E-Government* ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contohnya antara lain:

1. Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.
2. Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
3. E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan (Angraini, 2015)

Pengembangan *e-government* untuk sarana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan layanan publik artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi informasi dan komunikasi. Dalam arti melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik. Dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi didasarkan pada beberapa asas-asas diantaranya asas keterpaduan / sinergi, asas peningkatan kualitas sdm, asas manfaat / dayaguna, asas keamanan dan kehandalan,

---

asas legalitas, asas kesetaraan hak akses, asas fleksibilitas, asas *open system* (Pemerintah Bogor, 2013).

Untuk memuluskan langkah pembangunan dan pengembangan e-Government, dibutuhkan unsur "*political will*" disebabkan karena kecenderungan budaya birokrasi yang ada di Indonesia model manajemen dari atas ke bawah (*top down*), sehingga dalam pengimplementasian e-Government dibutuhkan dukungan yang dimulai dari pimpinan pemerintahan pada bagian tertinggi dan kemudian ke bagian bawahnya sesuai dengan jenjang masing-masing. (Barker et al., 1986)

#### **b. Manfaat TIK dalam E-Government**

Berdasarkan laporan OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) dalam Didit Praditya (2014) terdapat beberapa manfaat e-Government, penggunaan TIK oleh pemerintahan memunculkan beberapa keuntungan, yakni: Meningkatkan efisiensi, Meningkatkan pelayanan, Membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, Membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, Meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, Meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya,

Dengan memanfaatkan e-Government, maka dengan mudah akan mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti adanya transparansi, peningkatan keterbukaan dan akuntabel dibandingkan dengan pemerintahan yang model konvensional. Dengan e-Government diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga sistem demokrasi dapat berdiri kokoh. (Barker et al., 1986). Disamping itu penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data masih terus perlu dikembangkan agar dapat mengalami peningkatan dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang terkait secara eksternal. (Fahlefi, 2014)

#### **c. Pemanfaatan TIK pada Masyarakat**

Istilah *Information and Communication Technology* secara resmi digunakan oleh UNESCO, sementara di Indonesia istilah tersebut disebut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk dapat melakukan proses, dan menyampaikan informasi. TIK berkaitan dengan proses, penggunaan dan pemanfaatan alat bantu, manipulasi dan pengolahan sebuah informasi. Teknologi ini erat hubungannya dengan kegiatan transfer data dari sebuah komputer ke komputer lain ataupun dari sebuah perangkat ke perangkat yang lain. Dengan adanya TIK maka akan mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, tetapi TIK yang menggunakan media jaringan internet dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas atau penggunaannya.

---

Sebesar apapun *resources* TIK yang menggunakan jaringan internet untuk dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, sangat tergantung pada : sumber daya manusia, sumber daya masyarakat, infrastruktur, pengetahuan, energi dan bagaimana respon masyarakat terhadap hadirnya TIK di tengah-tengah mereka. Ketika akan memanfaatkan TIK dalam membantu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sehari-hari masyarakat, diperlukan adanya penyesuaian antara teknologi, dan kultur masyarakat setempat.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pada dasarnya pemanfaatan TIK di kalangan masyarakat desa Tongke-Tongke hingga saat ini masih dalam tahap pemanfaatan pribadi seperti untuk keperluan *chatting* dan membaca berita saja, sementara untuk keperluan belanja online masih sangat sedikit yang menggunakannya begitupula penggunaan untuk keperluan pendidikan dan informasi yang berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat masih minim digunakan.

#### **d. Pemanfaatan TIK pada Pemerintahan Desa Tongke-Tongke**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Disaat ini pemerintah telah mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang terlaksananya pelayanan kegiatan pemerintahan. Pemanfaatan tersebut disebut dengan *elektronik Government* yang pemanfaatannya dipergunakan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan kalangan yang berkepentingan. (Zulfahmi, Muhammad Badri, 2019). Saat ini program dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait dengan program pemanfaatan TIK tidak sampai di desa akan tetapi hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan (Didit, 2014). Dengan hadirnya gerakan dimulai dari desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mandiri, dengan didukung oleh pemanfaatan TIK, menjadi sebuah jawaban bahwa penyelenggaraan pemerintahan

---

berbasis TIK dapat dimulai dari bawah. Sehingga sebuah desa mampu melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Beberapa pemanfaatan TIK untuk desa diantaranya : (1) Penggunaan perangkat lunak dalam kegiatan operasional (Mustika, 2011); (2) Pelaksanaan pelayanan publik dengan menggunakan sistem informasi atau memanfaatkannya untuk memperkenalkan potensi dan sosialisasi pembangunan desa (Jahja, 2012). Hal ini dipandang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung terwujudnya kemandirian di tingkat desa.

Mencermati penerapan *e-Government* di Indonesia dalam waktu kurang lebih 5 tahun belakangan ini, terlihat berbagai program yang berkaitan dengan *e-Government* yang telah diprogramkan oleh pemerintah mengalami berbagai macam kendala. Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai akan tetapi masih lebih kecil bila dibandingkan dengan target awal yang telah direncanakan, terlebih lagi bila dibandingkan dengan kemajuan dengan skala regional. Boleh jadi ada kegagalan pemahaman oleh pemangku kepentingan dalam memaknai alternatif terobosan pemberian layanan berbasis *e-Government*. (Satriya, 2006). Ini dapat dilihat pada aspek sosial yang lebih sering mendominasi penyebab kegagalan dalam penerapan *e-Government* dibandingkan dengan aspek teknologi (Heeks, 2006). Penerapan *e-Government* di Desa Tongke-Tongke tentunya adalah untuk mewujudkan keterbukaan dan kecepatan akses informasi bagi masyarakat setempat, untuk mewujudkannya dibutuhkan teknologi yang dapat mengatasi kendala tersebut seperti adanya website yang dimiliki oleh pemerintah desa. Mengingat bahwa salah satu target *e-Government* adalah sektor publik, maka sistem *e-Government* yang dibangun pada umumnya menggunakan teknologi berbasis web. (Silalahi et al., 2015).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pada kantor pemerintah Desa Tongke-Tongke memiliki sarana TIK yang memadai ini terlihat dengan adanya 2 unit komputer dan 3 unit laptop yang digunakan oleh seluruh perangkat desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan perangkat lunak aplikasi perkantoran, serta 4 unit printer untuk mencetak dokumen. Untuk meningkatkan akses informasi telah terpasang antena penerima dan akses internet yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat yang datang. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk gelar sarjana hanya satu orang saja yaitu sekretaris desa, sementara yang lainnya masih menempuh pendidikan Strata Satu (S1), kepala desa belum mampu mengoptimalkan penggunaan TIK karena keterbatasan pengetahuan. Pemerintah Desa Tongke-Tongke telah memiliki akun email dengan menggunakan domain pemerintah (go.id), untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat

---

masih mengandalkan print out dan menempelkan pada papan pengumuman kantor desa atau di lokasi strategis seperti di masjid karena pemerintah desa belum memiliki website untuk dijadikan sebagai media informasi online, sementara untuk transparansi dalam mengelola anggaran desa dilakukan dengan membuat spanduk Infografis APBDes.

## **KESIMPULAN**

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung e-government di Desa Tongke-Tongkemasih kurang, ini terlihat dengan masih mengandalkan informasi berupa print out yang ditempel pada papan pengumuman desa karena belum memiliki website desa. Sarana dan prasarana TIK yang dimiliki telah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi sumber daya manusia yang ada mulai dari kepala desa sampai perangkat desa belum mencukupi. Dalam artian bahwa pemanfaatan TIK telah dilakukan dengan berbasis komputer akan tetapi masih rendah pada basis internet. Sementara respon masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *e-government* di Desa Tongke-Tongke masih rendah, dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan masih lambat dan terkadang membutuhkan waktu yang lama seperti dalam pengurusan administrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angraini, *Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten (Case Study Kabupaten Pelalawan Riau)* Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL. 7, NO. 2, Oktober 2015.
- Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar domains in different proteins: detection and significance. *Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme*, 29 Suppl, 54–68.
- Didit Praditya, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Di Tingkat Pemerintahan Desa* (Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 17 No.2, Desember 2014: 129-140).
- Fahlefi, Z. (2014). Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda). *Jurnal Paradigma*, 3(2), 996–1007.
- Heeks, 2006. “Implementing and Managing eGovernment An International Text”, London, England : SAGE Publications
- Inpres No. 3 tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.



- 
- Jahja, Ranggoaini. et. al. (2012). *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data Untuk Pembaruan Desa*. Yogyakarta: COMBINE Resource Institution (CRI).
- Mustika, Maya Dewi. (2011). *Desa Mandalamekar, Raih Kemandirian Teknologi dengan Open Source*. Indonesian e-Learning Media. Tersedia di <<http://idelearning.com/desamandalamekar-raih-kemandirianteknologi-dengan-open-source/>>. diakses 10 April 2019.
- Pemerintah Kota Bogor Kantor Komunikasi dan Informatika, *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung pengembangan E-Government* Pemerintah Kota Bogor 2014-2018.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* (SPBE).
- Satriya, E. (2006). *Pentingnya Revitalisasi E-Government*. Asisten *Pentingnya Revitalisasi E*. 38–43.
- Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian konsep dan kondisi E-Government di Indonesia. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)*, 1(1), 10–16. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=356188>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
- Wibawa, Samudra. 2009. *Administrasi Negara : isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulfahmi, Muhammad Badri, L. S. (2019). Efektivitas Media E-Government Dalam Mendukung Transparansi Informasi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1(1), 1–11.